Journal of Management Branding
Volume 1, Nomor 1, February 2024: 50-58 | e-ISSN : 3047-3179

PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Anita Ramadhani1, Syahrial Shaddiq2
Post Graduate Management, Muhammadiyah University of Mamuju, Indonesia
[1]Email : anitaramadhani394@gmail.com
[2]Email : syahrial.shaddiq@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Pengenalan e-Government sebagai teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan membawa perbaikan lebih lanjut dalam organisasi dan operasional pemerintahan.Hal ini bertujuan agar pegawai dapat menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan e-Government yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju pada OPD bagian pelayanan memberikan manfaat terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang ada kepada masyarakat, berdasarkan pada penyampaian pelayanan yang baik dan efektif. Ada kemungkinan hal itu akan terjadi dan juga memungkinkan peningkatan efisiensi dan penyediaan informasi yang konsisten kepada publik.Pemerintah perlu lebih meningkatkan sumber daya yang ada untuk mendukung kinerja. Karena ini adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi seberapa baik Anda memanfaatkan e-Government untuk lebih aktif memantau aktivitas komunitas di platform dan media sosial yang ada, memastikan komunitas menerima respons yang lebih cepat dari staf, dan mengaktifkan program yang ada untuk memberikan informasi yang berkualitas.

Kata kunci : Pemanfaatan, E-Government, Kinerja Pegawai

Abstract

The introduction of e-Government as information and communication technology in government brings further improvements in government organization and operations. This aims to enable employees to carry out and carry out their duties and functions effectively and efficiently. This research uses a qualitative approach. Data was obtained from interviews, observations, and documents. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the use of e-Government introduced by the Mamuju Regency Government in the OPD service section provides benefits to employee performance in providing existing services to the community, based on good and effective service delivery. There is a possibility that this will happen and will also enable increased efficiency and consistent provision of information to the public. The government needs to further increase existing resources to support performance. Because this is one of the factors that influences how well you utilize e-Government to more actively monitor community activity on existing platforms and social

media, ensure communities receive faster responses from staff, and activate existing programs to provide quality information .

Keywords: Utilization, E-Government, Employee Performance

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik yang termasuk dalam kategori pelayanan publik tentunya telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut semakin terlihat ketika pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 2 Maret 2020. Meskipun pemerintah dengan cepat merombak sistem pemerintahan, penggunaan teknologi di dalam pemerintahan pada awalnya sangat lambat atau terhenti, namun masih terdapat kekurangan dalam pemanfaatan teknologi karena masyarakat sudah terbiasa dengan prosedur tatap muka. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor Tahun 2019 menerbitkan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2019 Nomor 109 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pengelolaan Kependudukan. Pada tahun 2020, hampir setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kota hingga desa, perlu lebih aktif terintegrasi dengan teknologi. Oleh karena itu, e-Government menjadi pilihan yang tepat untuk menjaga roda pemerintahan tetap stabil agar tetap berjalan lancar.

Langkah pemerintah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, termasuk kebutuhan akan layanan pemerintah yang disediakan oleh penyedia layanan publik..Efektivitas pemerintahan terutama bergantung pada kinerja pelayanan publik yang baik, karena UUD 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara demi kesejahteraannya. Isi pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengingat hadirnya e-Government sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintahan, maka upaya-upaya besar terus dilakukan untuk lebih meningkatkan organisasi dan operasional pemerintahan agar Pegawai atau ASN dalam lingkup pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana mestinya (efektif dan efisien). Ditetapkan dalam Pasal 95, Pasal 1 Ayat 3 Perpres Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres) . E-Government juga mempunyai kelebihan dalam membangun hubungan antar pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara pemerintah dengan pasar global (pasar), baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan adanya e-Government, hubungan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam hal ini. Dengan bantuan sistem online, Pemerintah dapat dengan mudah menjangkau masyarakat.

Di bidang kepegawaian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian Negara, perlunya membangun lembaga-lembaga sipil negara yang jujur, profesional, netral, dan bebas korupsi. Bebas dari kolusi dan nepotisme.Kami menuntut agar seluruh ASN terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan tidak hanya kepada

masyarakat, namun juga dalam memberikan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun pemerintah terus mengembangkan program baru untuk layanan tersebut, masalah masih terjadi secara internal dan di dalam komunitas .

Peran pegawai dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi sangat penting karena dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja pegawai di masa depan. Karena adanya pedoman penerapan e-Government , maka dapat dikatakan bahwa merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam dunia pemerintahan. Penerapannya sudah menjadi hal yang wajib dan bisa dikatakan menjadi kebutuhan pelayanan publik di era teknologi ini. Segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui pemanfaatan e-Government diharapkan dapat meminimalkan kerentanan dan membuat penggunaan waktu menjadi lebih efisien.

Proses penyampaian informasi mengenai dokumen yang diperlukan secara online .Untuk memastikan karyawan tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan tersebut.Dan warga tidak perlu lagi mengantri panjang atau bolak-balik ke Kantor Pendaftaran Penduduk untuk mengurus berkas yang bisa diakses secara online.Ini berfungsi sebagai sumber daya untuk membantu pejabat pemerintah dalam bekerja untuk komunitas mereka.

PENELITIAN TERDAHULU

Pada poin penelitian sebelumnya, penulis menjadikannya sebagai bahan referensi untuk menyelesaikan penelitian ini, namun selain dari penelitian sebelumnya, akan lebih mudah bagi penulis untuk mencantumkan langkah-langkah penyusunannya dari sudut pandang teoritis dan konseptual. Penelitian awal oleh Willia Satiawati, Patar Rumapea, Jericho D Pombengi (2016) Implementasi kebijakan e-gov dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan Pencatatan Sipil Otoritas Juri Ibu Pada Pelayanan Kependudukan Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ruang lingkup implementasi kebijakan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan public. Dalam hal ini secara khusus kami bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan e-Government terhadap kinerja pegawai di pemerintah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Tantangan bagi e-Government adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk proses bisnis berbasis Internet. Demikian pula dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pengembangan e-Government yang masih kurang. Meskipun demikian, staf yang melayani pada setiap OPD Pemkab Mamuju dimaksimalkan. Proses pelayanan pada OPD Pemkab bagian pelayanan beberapa masih kuat berpijak pada perspektif asas kekeluargaan. Ketika orang-orang yang paling dekat dalam hal suku, ras, agama, atau bahkan status dianggap lebih penting. Dalam hal ini, penyelenggara tidak bisa terus memberikan layanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini oleh Willia Satyawati, masing-masing memiliki persamaan dalam membahas e-goverment dalam kerangka pemerintahan khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian yang sama adalah metode kualitatif .

Survei Kedua, oleh Etinus Wenda, Nova Prangiten dan Berry Ronda (2017) Kinerja Pegawai Puskesmas Wenham Lokasi prima di Kabupaten Ranee Jaya. Penulis bertujuan untuk mengukur kinerja petugas puskesmas dalam melakukan penelitian ini. Permasalahan yang teridentifikasi dalam tinjauan ini adalah kinerja pegawai Puskesmas Wenham yang masih kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyediaan sarana, peralatan dan beberapa fasilitas pendukung masih sangat kurang memadai dan tenaga (bidan dan perawat) kesulitan memberikan pelayanan yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Fokus dari penelitian sebelumnya adalah terhadap kinerja pegawai sektor kesehatan, yang berkaitan dengan aspek kinerja pegawai.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Susanti Marbun, Jhoni Hanny Posumah, dan Sonny Rompas (2015). kinerja karyawan meningkatkan pelayanan kependudukan di Kota Manado dan Pelayanan Pengelolaan Kependudukan di Catatan Sipil. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai dalam meningkatkan pengelolaan kependudukan di Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Manado dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan yang terjadi saat ini bermula dari keluhan masyarakat bahwa kinerja pegawai tidak sesuai dengan slogan yang ada. Slogan menyatakan bahwa layanan yang diberikan gratis dan tidak memperumit masalah. Namun pada kenyataannya pelayanan yang diberikan kurang memadai, rumit, dan memakan waktu yang sangat lama.Pada penelitian terdahulu ada yang menemukan bahwa Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan layanan pengelolaan kependudukan dengan baik di kota. Hal ini terlihat melalui beberapa metrik dalam pengukuran kinerja: produktivitas, akuntabilitas, kualitas layanan, daya tanggap, dan tanggung jawab. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian-penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian ini, terbukti dengan adanya diskusi yang mengemukakan kinerja petugas dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan kependudukan, diantaranya berada di lokasi subjek yaitu Biro Kependudukan dan Pelayanan Pengelolaan Kependudukan yang berpusat di Kantor registrasi.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Tronkang ke-6 Gledis, Deisy Lengkong, Laloma Alden, (2019).Dampak penerapan Kebijakan Standar Operasional Prosedur terhadap kinerja pegawai PT.PLN Unit Pelayanan Amuran.Penelitian ini menemukan permasalahan terkait PT.Departemen Pelayanan Pelanggan PLN Amuran mempunyai kelemahan dalam penerapan SOP mengenai kinerja pegawai PLN.PT yang memiliki 4.444 karyawan. PLN Tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan, belum kompeten, tepat waktu, memahami pekerjaan, melayani masyarakat, menghormati atasan, proses kerja terlalu lama, belum terlalu lama Banyak kontrol terhadap pekerjaan seseorang, sikap dan perilaku terhadap rekan kerja kurang optimal. Para peneliti percaya bahwa konsep kinerja merupakan aspek penting atau menentukan dalam manajemen sumber daya manusia dalam organisasi yang efektif dan mewakili variabel penting dan efektif untuk merangsang penerapan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan oleh peneliti, penerapan pedoman standar operasional prosedur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Customer Service Department PT.PLN Amuran dapat teruji keberlakuannya secara empiris

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian menggunakan teori e-Government dari Achmad Habibullah (2010).penelitian ini memerlukan 7 orang informan.Yakni, dinas catatan sipil dan kependudukan sebanyak 2 orang,

Dinas PTSP sebanyak 3 orang diantaranya tenaga Pelayanan Publik sebanyak 2 orang dan ASN 1 orang dan Penerima Pelayanan Sosial sebanyak 1 orang pada Dinas Sosial, serta Pengguna Informasi Teknis sebanyak 2 orang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju

Penelitian ini dilakukan dengan berdasar kepada tiga manfaat dari e – goverment dan juga mengacu pada teori dari Achmad Habibullah (2010) :

1. E – government dapat meningkatkan efesiensi
2. E _ government dapat membuat Pegawai memberikan pelayanan dengan baik dan efektif.
3. E _Goverment dapat memberikan akses data dan informasi kepada publik secara adil dan merata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 yang membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang dimaksudkan manajemen SPBE merupakan suatu pencapaian penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta menciptakan layanan yang berkualitas. Dengan demikian tidak terlepas dari tingkat sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden. Dalam UU nomor 05 tahun 2014 pasal 1 ayat (5) yang menetapkan bahwa manajemen ASN merupakan pengelolahan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi , kolusi, dan nepotisme. Ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Ada berbagai inovasi yang dapat dilakukan, seperti adanya invosi e-government. Pelaksanaan program yang melibatkan teknologi sudah mulai diterapkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Sejalan dengan penelitian dari Elvis Ruru (2020) pada poin dimensi Interpretasi dalam dimensi ini merupakan usaha untuk menafsirkan agar program menjadi suatu rencana yang dapat diarahkan dengan tepat dan dapat memungkinkan diterima bahkan dilaksanakan. Sama halnya dalam penelitian ini, dapat dilihat dari pemanfaatanya dalam pelaksanaan kinerja pegawai. Karena tidak selamanya pemerintah hanya berjalan ditempat tanpa adanya perkembangan. Egovernment diharapkan dapat menjadi loncatan bagi pegawai untuk dapat meningkatkan kualitas SDM itu sendiri sehingga dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan. Sebagaimana dalam konsep egovernment menurut Hardiansyah (2011) mengungkapkan e-government merupakan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi dalam rangka mengembangkan dan memberikan peningkatan pada proses pelayanan public, yang efisien, transparan dan efektif.

Sejalan dengan teori dari Habibullah (2010), mengatakan bahwa e-government merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa manfaat yang ditemukan yaitu: Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam rana pemerintahan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan manfaat egovernment untuk meningkatkan efisiensi dalam rana pemerintahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pangkep telah dirasakan oleh pegawai setempat dibuktikan dengan tingkat pengeluaran biaya kertas untuk pencetakan dokumen

kependudukan. Saat ini menjadi lebih efisien karena prosedur yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri, dalam Permendagri No. 109 tahun 2019 perihal tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Dalam Permendagri tersebut bahwa semua dokumen (kecuali e-KTP dan KIA) bisa dicetak menggunakan kertas putih HVS ukuran A4 80 gram. Dengan demikina manfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam rana pemerintahan dapat dirasakan pegawai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah tidak lagi harus menyediakan kertas khusus untuk mecetak dokumen kependudukan selain e-KTP dan KIA. Tidak hanya pegawai yang merasakan manfaat ini tetapi juga masyarakat sebagai penerima pelayanan juga merasakan efisiensi dari egovernment itu sendiri. Selain itu juga manfaat yang dirasakan dalam meningkatkan efisiensi yaitu dari segi waktu. Para Pegawai akan dimudahkan dalam dalam mencari data mengenai kependudukan ,informasi alamat , jumlah keluarga serta data administrasi masyarakat lainnya. Karena, dalam sistem semua sudah ditata dan terstruktur. Jadi, jika ingin mencaridata seseorang tinggal memasukkan nama dan Nomor Induk KTP, maka secara otomatis data yang diperlukan muncul di layar komputer. Hal ini juga memudahkan pegawai untuk mengecek datadata masyarakat yang sama atau ganda. Jadi, mudah diketahui jika ada masyarakat yang mau memasulkan data atau mau membuatdata yang berbeda dengan orang yang sama. Hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Tercantum dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 bahwa penekanan Data dan informasi yang dimaksud adalah data dan informasi yang mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, yangmana data tersebut diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, atau pihak lain. Artinya data yang dimasukkan yang diperoleh dari masyarakat akan sama seperti data yang dikirim dari daerah hingga sampai ke pusat. Sehingga meminimalisir terjadinya data yang ganda. Jadi, menurut peneliti perkembangan yang terjadi dalam dunia pemerintahan dalam memanfaatkan egovernment itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bertanggung jawab dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik agar masyarakat dapat menerima haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh Willia Setiawati (2016) E-government diartikan sebagai proses pemanfaatan teknologi dan merupakan alat untuk membantu menjalankan system pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-government, yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya.

E-Government , sebagaimana undang-undang berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2006, adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh upaya dilakukan untuk memaksimalkan dampak , baik bagi karyawannya maupun bagi masyarakat itu sendiri yang menjadi penerima manfaat .

Hasil penelitian yang kedua Pada OPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan e government yang hasilnya sangat membantu Masyarakat dan juga membantu ASN atau pegawai pada OPD tersebut. Dinas tersebut telah menempatkan OPD OPD teknis pada kantor tersebut sehingga maemudahkan Masyarakat dalam mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan perizinan. Masyarakat tidask perlu lagi ke OPd lain tapi terfokus ke 1 Kantor saja. Selain

itu pelayanan perizinan dapat diakses melalui web / online yang juga memudahkan Masyarakat untuk mengakses kebutuhan dalam hal ini persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan izin.

Pada OPD lainnya dalam Hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,pengurusan izin lingkungan bisa diakses melalui web / online juga dalam 1 aplikasi,Contoh pengurusan Amdal dapat diakses melalui web AMDALNET. Pengurusan SPPL untuk usaha kecil tidak perlu lagi dilakukan karena dengan mengurus NIB secara otomatis SPPL pun akan Terbit.

Pada OPD Dinas sosial segala Sesutu mengenai bvantuan dan kegiatan sosial dapat diakses melalui website resimi OPD tersebut.

Ketiga, aspek terpenting dalam pelaksanaan program yang ada adalah memberikan akses yang sama kepada warga negara terhadap informasi.Sebagaimana dikemukakan oleh Risnandar (2019), e-Government hadir sebagai reformasi atau perubahan penyelenggaraan lingkup pemerintahan dan dinyatakan fokus pada keterbukaan dan tanggung jawab penyediaan informasi publik. Segala Informasi tentang berbagai kegiatan mengenai pemerintahan saat ini. Selain itu, e-Government digunakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh organisasi swasta, dan menarik perhatian.

Ke empat, OPD Pemkab Mamuju telah dilengkapi masing-masing website yang akan memudahkan kepada Masyarakat untuk mengakses informasi dan dapat memberikan pengaduan secara mudah dan langsung dapat di tindak lanjuti oleh masing masing OPD.

Poin penting hasil penelitian ini adalah dengan pengimplementasian E -government memudahkan dan membantu pegawai /ASN dalam melaksanakan tugas fungsinya dan secara otomatis dapat meningkatkan kinerja nya .

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan Akhir Berdasarkan temuan penelitian yang disampaikan mengenai pemanfaatan e-Government dalam implementasi kinerja pegawai di Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat maka temuan penelitian yang dilakukan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Nomor Registrasi Kementerian Dalam Negeri oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Urusan Keperdataan Permendagri No kini lebih efisien.109 Tahun 2019 tentang tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pengelolaan kependudukan.Permendagri memperbolehkan semua dokumen (kecuali e-KTP dan KIA) dicetak di atas kertas HVS putih dengan format A4 80 gram. Pemerintah tidak perlu lagi menyediakan formulir khusus untuk pencetakan dokumen kependudukan e-KTP dan KIA non-.Tidak hanya pegawai yang merasakan manfaat tersebut, namun masyarakat sendiri juga merasakan efisiensi e-Government sebagai penerima layanan.

2. Pada pelayanan perizinan pada OPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan trerpadu Satu Pintu, Masyarakat dapat mengakses perizinan dengan online. Segala bentuk pengurusan dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut. Begitu pula pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ,pengurusan SPPL secara otomatis akan muncul pada saat pengurusan NIB pada dinas Penanaman Modal tadi,dan pengurusan UKL UPL,AMDAL,DELH dan Pertek lainnya untuk tahap awal pelaku usaha dapat mengakses suatu aplikasi sehingga memudahkan pelaku usaha

untuk mengetahui persyaratan apa yang dibutuhkan dan memudahkan untuk pengurusan izinnya. Jadi pada OPD pelayanan Egoverment ini sangatlah berpengaruh penting.

3. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan efektif, pegawai perlu mengalami kemajuan dalam hal ini kinerja pegawai. E-Government sebenarnya membantu pegawai menjangkau komunitasnya melalui platform yang tersedia. Pemberian layanan dimaksimalkan dan seefektif mungkin.Hal ini akan mendorong pegawai untuk lebih meningkatkan proses pemberian layanan , meskipun proses pemberian layanan masih dianggap buruk oleh masyarakat.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih belum puas dengan sistem yang ada saat ini. Banyak orang masih tidak puas dengan proses online. Jika jaringan di sistem Anda lambat, misalnya layanan yang diberikan tidak efektif atau rumit, atau Disdukcapil dikatakan memiliki masalah yang sudah berlangsung lama dengan jaringan yang ada, maka pemrosesan dokumen dapat menimbulkan masalah.

4. Dalam rangka memberikan akses informasi yang konsisten kepada masyarakat, OPD pelayanan pada Pemkab Mamuju telah memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi,pengurusan perizinan baik itu usaha kecil,menengah maupun usaha besar,memberikan informasi tentang pelayanan sosial dan masih banyak lagi yang lainnya.Pemkab Mamuju telah merasakan manfaat e-Government dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Nomor tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, teknologi pelayanannya meliputi teknologi cloud computing, teknologi media sosial, teknologi integrasi saluran komunikasi, dan integrasi saluran komunikasi lainnya Berbagi teknologi otomatisasi/integrasi dan teknologi analisis data. Dan sejauh ini masyarakat telah merespon dengan baik dan tanggap terhadap informasi yang disampaikan melalui website atau platform yang digunakan oleh masing masing OPD pada Pemkab Mamuju. Masing masing OPD telah dilengkapi dengan website sehingga mempermudah Masyarakat untuk mengakses dan memberikan pengaduan terkait pelayanan dalam Pemerintah kabupaten Mamuju.Saluran terintegrasi seperti telepon, faks, email, website, ponsel, media sosial, dan saluran dukungan harus disediakan untuk memungkinkan pengguna mengakses portal pusat layanan.

SARAN

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran seperti dibawah ini agar dapat mendukung pemanfaatan e-Government dalam implementasi kinerja pegawai di Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat :

1. Pemerintah perlu meningkatkan lebih lanjut sumber daya yang ada untuk mendukung kinerja Karena inilah salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik e-Government dapat digunakan.
2. Lebih aktif memantau aktivitas masyarakat di platform dan media sosial yang ada untuk memastikan masyarakat mendapat tanggapan cepat dari staf atau operator website masing masing OPD
3. Peningkatan infrastruktur yang diperlukan , fasilitas internet yang unggul , dan teknologi lainnya untuk menunjang prestasi kerja.
4. Diharapkan juga terus aktif, berinteraksi dengan program yang ada dan memberikan informasi yang berkualitas.

REFERENSI

Rini, E. P., Kom, M., Saputra, D. I. S., & Kom, M. (2021). Sistem Informasi Manajemen Di Era Revolusi Industri 4.0 (Vol. 1). Zahira Media Publisher.

PALI, S. T. T., TAMPI, G., & LONDA, V. (2021). PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 7(Wismayanti, K. W. D., Purnamaningsih, P. E.,

Kusumasanti, I. G. A. N., Rahayu, N. M. W. P., Yasintha, P. N., Sari, N. M. P., ... & Sari, D. (2023). E-Government dan Pelayanan Publik. Nilacakra.107).

Rizal, G. S. (2023). Peran ASN Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik melalui Ruang Komunikasi Publik. Jurnal Mutakallimin: Ju Nadya Chrismonita, V. (2020).

EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING (Studi Di Disdukcapil Kota Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).rnal Ilmu Komunikasi, 6(2).

Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 22(2), 185-196.

Kusuma, A. A., Wasistiono, S., & Pitono, A. (2021). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13(2), 145-158.

Setiawan, A. B. (2011). Studi Kesiapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implementasi E-Goverment dengan Kerangka Kerja Cobit. Buletin Pos dan Telekomunikasi, 9(1), 49-70

Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 22(1), 1-17

Sari, Kusuma & Winarno,Wahyu. 2012. Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. JEAM, 11 (1)

Habibullah, A. 2010 . Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E- government. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jember, 23(3) : 18-195

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UUD nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Permendagri No. 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Kapres No. 20 tahun 2006